

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil, sekurang-kurangnya terdapat 8 peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan Negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik, dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan tenaga kerja, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertambangan dan Energi bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang Pertambangan dan Energi.

Perencanaan di bidang Pertambangan dan Energi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumber daya alam, lingkungan, iptek dan memperhatikan perkembangan global. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan pasal 15 ayat (3) menyatakan *bahwa "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)"*;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJMN).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007 - 2012.
12. RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun rencana kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dengan adanya rencana strategis SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping difungsikan sebagai pedoman sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkes).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di bidang Pertambangan dan Energi;
2. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber-sumber lainnya.
3. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi secara umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012 - 2017;
7. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.1 Tujuan Khusus

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 bertujuan untuk menetapkan Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjabarkan arah strategi kebijakan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017.

1.3.2 Tujuan Umum

1. Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017.
2. Menetapkan arah masa depan yang hendak dituju beserta tahapannya di bidang Pertambangan dan Energi.
3. Menyiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional bidang Pertambangan dan Energi.
4. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi agar dapat berhasil guna dan berdaya guna.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyanjian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi 2012 - 2017 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Strategis (Renstra), Disamping itu dilengkapi dengan maksud dan tujuan khusus serta tujuan umum, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional, kedudukan dan peranan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi dalam perencanaan daerah serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

2. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Dalam bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), kinerja pelayanan SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

3. BAB IV Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Dalam bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Telaahan Visi dan Misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Strategis (Renstra) KL dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. BAB V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Dalam bab ini memuat rumusan Visi, Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang disajikan dalam bentuk tabel beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, Kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi disusun berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran perbidang yang

memuat tahapan strategi untuk mendukung tercapainya kinerja pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi.

5. BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk mendukung pencapaian kinerja program pertambangan dan energi.

6. BAB VII Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB II

GAMBAR PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



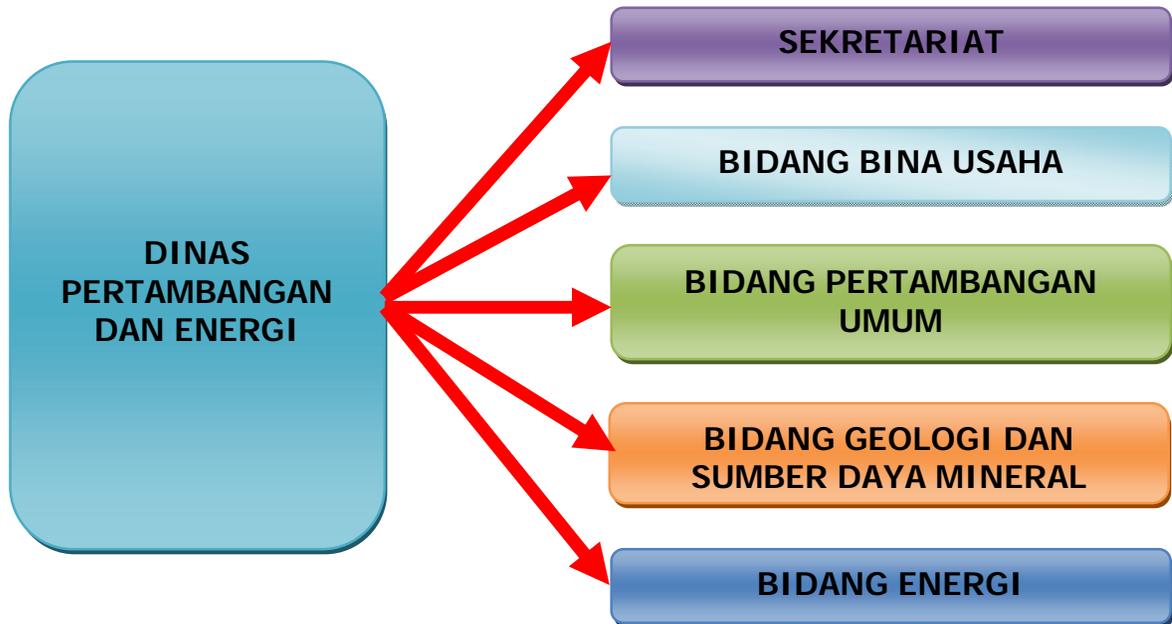
**Gambar 2.1 Kantor Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonstrasi di bidang Pertambangan dan Energi, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Pertambangan dan Energi;
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan dan Energi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

2.2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Bina Usaha

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Perizinan;
- c. Seksi Pengawasan;

4. Bidang Pertambangan Umum

- a. Seksi Eksploitasi dan Konservasi;
- b. Seksi Pasca Tambang;
- c. Seksi Pengembangan Wilayah Tambang;

5. Bidang Energi

- a. Seksi Minyak dan Gas;
- b. Seksi Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Energi Baru Terbarukan.

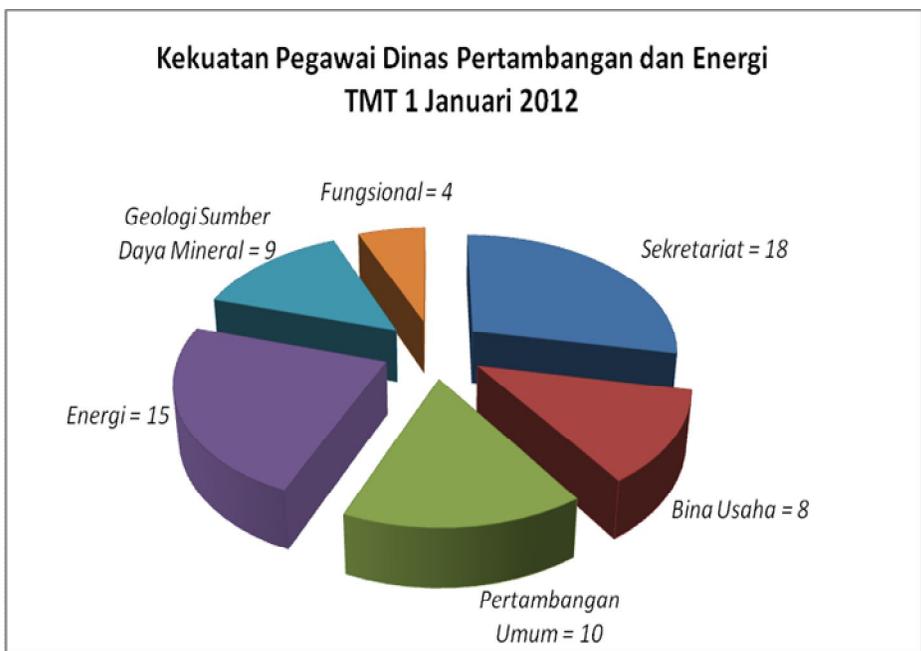
6. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

- a. Seksi Mitigasi Bencana Geologi;

- b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
- c. Seksi Pengelolaan Air tanah.

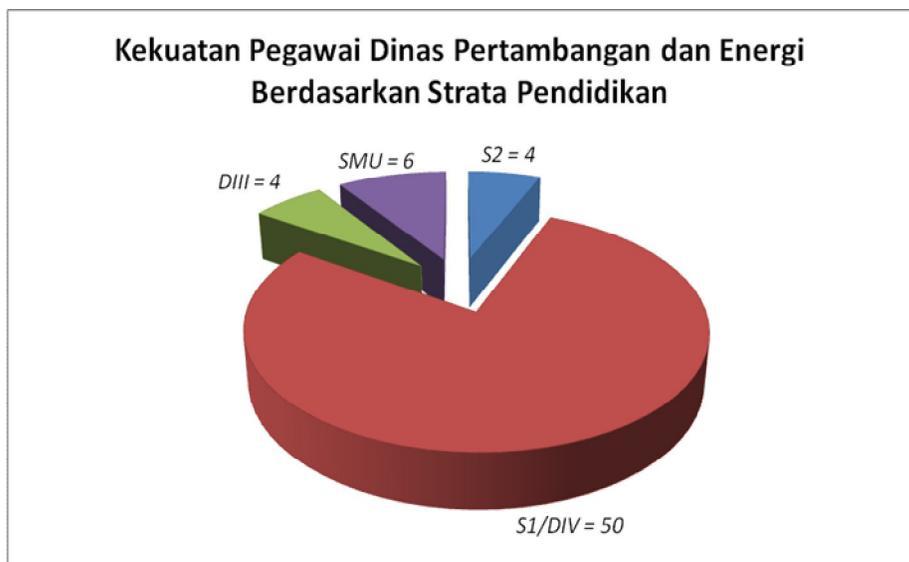
2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 memiliki jumlah pegawai sebanyak 64 orang yang tersebar di 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang Eselon III :



Gambar 2.3 Kekuatan Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TMT 1 Januari 2012

Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi, sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kekuatan Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Strata Pendidikan

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 – 2011

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan																		
1.	Terjalinnnya hubungan yang harmonis Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperhitungkan perkiraan pendapatan dari sektor pertambangan dari dana bagi hasil minyak bumi	-	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya Pengawasan Produksi, K3LH Pertambangan Umum	-	1 paket	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
3.	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Inspektur Tambang terhadap perusahaan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
4.	Terselenggaranya program/kegiatan Dinas yang berkualitas	-	1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terselenggaranya Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	-	-	-	-	-	100.000 KK	-	-	-	-	0 KK	-	-	-	-	0%

II Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan																				
6.	Tersedianya Master Plan Kelistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 master plan	-	-	1 master plan	-	-	-	-	1 master plan	-	-	-	-	100%	-	-	-	
7.	Tersedianya listrik dengan menggunakan fasilitas PLT Hybrid	-	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-	-	
8.	Tersedianya listrik dengan menggunakan PLTS	-	1 paket	-	-	215 unit	-	273 unit	-	-	215 unit	-	273 unit	-	-	100%	-	100%	-	
9.	Tersedianya listrik di daerah terpencil dan terawatnya peralatan PLTS	-	1 paket	-	-	-	-	Accu = 60 unit, LED 3 = 90 unit, LED 6 = 100 unit	-	-	-	-	Accu = 60 unit, LED 3 = 90 unit, LED 6 = 100 unit	-	-	-	-	-	100%	-
10.	Tersedianya listrik di daerah terpencil dengan menggunakan PLTS Terpusat	-	1 unit (6.000 WP)	-	-	-	-	1 unit (6.000 WP)	-	-	-	-	1 unit (6.000 WP)	-	-	-	-	-	100%	-
11.	Tersedianya listrik Untuk Rumah Sakit Umum Type B Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	0 unit	0 unit	-	-	-	-	-	0%
12.	Tersedianya informasi Pemanfaatan Energi Nuklir	-	2 kegiatan	-	-	-	-	-	2 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	50%
13.	Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	0 laporan	-	-	-	-	-	0%
14.	Tersedianya peralatan Konverter dan Inverter untuk PLT Hybrid	-	1 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	100%	-	-	

III Program Penyediaan dan Pengembangan Air Baku																			
15.	Tersedianya air bersih di daerah yang kesulitan air bersih	-	1 paket	-	-	13 lokasi	-	-	-	-	13 lokasi	-	-	-	-	100%	-	-	-
16.	Tersedianya air bersih di daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang	-	1 paket	-	-	14 lokasi	-	-	-	-	14 lokasi	-	-	-	-	100%	-	-	-
17.	Tersedianya air bersih di daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur	-	1 paket	-	-	9 lokasi	-	-	-	-	9 lokasi	-	-	-	-	100%	-	-	-
18.	Tersedianya air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	4 lokasi	-	-	4 lokasi	-	-	-	-	4 lokasi	-	-	-	-	100%	-	-	-
19.	Tersedianya Fasilitas Penyaringan Air Bersih Serta Jaringannya	-	1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
20.	Tersedianya alat penjernih air di kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
IV Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Air																			
21.	Tersedianya air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
22.	Tersedianya peta Geohidrologi	-	1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

V	Program Penataan Peraturan Perundang – undangan																		
23.	Tersedianya PERDA Air Bawah Tanah	-	1 PERDA	-	-	1 PERDA	-	-	-	-	1 PERDA	-	-	-	-	100%	-	-	-

Pangkalpinang, Januari 2014

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tabel 2.1) menunjukkan bahwa:

- I. Tingkat indikator capaian kinerja pada program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dari tahun 2007 - 2011 telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% meskipun pada kegiatan konversi minyak tanah ke LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai target. Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh :
 1. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik.
 2. Adanya pendekatan persuasif yang bersifat pembinaan dan pengawasan antara pelaku/perusahaan pertambangan dalam menerapkan *good mining practice*.
 3. Berjalannya pengawasan dan peninjauan secara langsung ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan sehingga terjalin koordinasi yang baik.
 4. Lokasi kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 Kabupaten/Kota dapat termonitoring dengan baik.

Pada pencapaian kinerja indikator jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi minyak tanah ke LPG belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pada tahun 2011 konversi minyak tanah ke LPG secara Nasional ditunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada tahun 2012.
2. Belum adanya kesiapan pengecer di SPBBG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya pemecahan masalah diatas antara lain:

1. Melanjutkan kegiatan konversi minyak tanah ke LPG secara Nasional pada tahun 2012.
2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan SPPBG.

II. Tingkat indikator capaian kinerja pada program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dari tahun 2007 - 2011 dapat dikatakan telah mencapai target karena sudah mendekati target yang ditentukan meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai seperti pembangunan gardu listrik untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Pemanfaatan Energi Nuklir dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR.

Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembuatan *master plan* kelistrikan
2. Tersedianya SDA (Sumber Daya Manusia) yang memadai dalam Pembangunan PLT Hybrid
3. Akses ke lokasi pembangunan dan pemasangan PLTS yang memadai serta koordinasi dengan masyarakat yang baik.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pembangunan gardu listrik untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Pemanfaatan Energi Nuklir dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR, antara lain:

1. Telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sehingga kegiatan ini tidak bisa terlaksana, sedangkan untuk melaksanakan proses lelang yang ketiga tidak dimungkinkan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan.
2. Adanya tumpang tindih penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir antara pemerintah pusat (BATAN, Bapeten dan Kemenristek) dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya pemecahan masalah diatas antara lain:

1. Membuat surat Gubernur yang ditujukan ke PT. PLN Persero Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilaksanakan pekerjaan pembangunan distribusi gardu listrik karena masih dalam kewenangan PT. PLN Persero.

2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat (BATAN, Bapeten dan Kemenristek) agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir.

III. Tingkat indikator capaian kinerja pada program Penyediaan dan Pengembangan Air Baku, program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan program Penataan Peraturan Perundang-undangan dari tahun 2007 - 2008 dapat dikatakan telah mencapai target. Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam pelaksanaan program/kegiatan
2. Akses ke lokasi pembangunan fasilitas air tanah yang memadai
3. Koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang baik
4. Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pusat yang baik.

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2007 – 2011

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan																	
1.	Terjalannya hubungan yang harmonis Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperhitungkan perkiraan pendapatan dari sektor pertambangan dari dana bagi hasil minyak bumi	65.940.000	74.400.000	42.900.000	53.826.400	53.700.000	63.540.000	73.632.800	32.900.000	53.826.380	53.700.000	96,36%	98,97%	76,69%	100%	100%	-	-
2.	Terselenggaranya Pengawasan Produksi, K3LH Pertambangan Umum	-	104.400.000	-	-	-	-	89.190.000	-	-	-	-	85,43%	-	-	-	-	-
3.	Terselenggaranya Inspeksi dan Pelaksanaan Inspektur Tambang	-	49.550.000	-	-	-	-	47.850.000	-	-	-	-	96,57%	-	-	-	-	-
4.	Terselenggaranya program/kegiatan Dinas yang berkualitas	63.262.600	179.100.000	150.000.000	149.400.000	149.400.000	31.631.300	179.065.000	150.000.000	149.139.000	149.160.000	50,00%	99,98%	100%	99,83%	99,84%	-	-
5.	Terselenggaranya Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	58.000.000	-	-	-	-	12.410.000	-	-	-	-	21,40%	-	-

II Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan																		
6.	Tersedianya Master Plan Kelistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		576.040.000					572.550.000				-	99,39%	-	-	-	-	-
7.	Tersedianya listrik dengan menggunakan fasilitas PLT Hybrid	-	1.009.300.000	-	-	-	-	1.006.673.693	-	-	-	-	99,74%	-	-	-	-	-
8.	Tersedianya listrik dengan menggunakan PLTS	-	1.016.390.000	3.000.000.000	2.229.850.000	-	-	1.001.760.000	2.833.850.181	1.937.285.870	-	-	98,56%	94,46%	86,88%	-	-	-
9.	Tersedianya listrik di daerah terpencil dan terawatnya peralatan PLTS	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	96.950.000	-	-	-	-	96,95%	-	-	-
10.	Tersedianya listrik di daerah terpencil dengan menggunakan PLTS Terpusat	-	-	-	736.460.000	-	-	-	-	683.140.330	-	-	-	-	92,76%	-	-	-
11.	Tersedianya listrik Untuk Rumah Sakit Umum Type B Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	495.350.000	497.445.000	-	-	-	3.320.000	1.401.400	-	-	-	0,67%	0,28%	-	-
12.	Tersedianya informasi Pemanfaatan Energi Nuklir	-	-	-	-	102.930.000	-	-	-	-	62.706.400	-	-	-	-	60,92%	-	-
13.	Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR	-	-	-	-	211.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
14.	Tersedianya peralatan Konverter dan Inverter untuk PLT Hybrid	-	-	115.675.000	-	-	-	-	114.745.000	-	-	-	-	99,20%	-	-	-	-
III Program Penyediaan dan Pengembangan Air Baku																		
15.	Tersedianya air bersih di daerah yang kesulitan air bersih	-	673.827.000	-	-	-	-	670.697.000	-	-	-	-	99,54%	-	-	-	-	-

16.	Tersedianya air bersih di daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang	-	723.827.000	-	-	-	-	715.397.000	-	-	-	-	98,84%	-	-	-		
17.	Tersedianya air bersih di daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur	-	527.947.000	-	-	-	-	510.160.000	-	-	-	-	96,63%	-	-	-		
18.	Tersedianya air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	790.653.000	-	-	-	-	768.866.000	-	-	-	-	97,24%	-	-	-		
19.	Tersedianya Fasilitas Penyaringan Air Bersih Serta Jaringannya	589.110.000	-	-	-	-	577.960.000	-	-	-	-	-	98,11%	-	-	-		
20.	Tersedianya alat penjernih air di kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	25.190.000	-	-	-	-	23.570.000	-	-	-	-	93,57%	-	-	-		
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Air																	
21.	Tersedianya air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	5.250.000.000	-	-	-	-	5.216.984.710	-	-	-	-	99,37%	-	-	-		
22.	Tersedianya peta Geohidrologi	858.175.000	-	-	-	-	839.525.000	-	-	-	-	-	97,83%	-	-	-		
V	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
23.	Tersedianya PERDA Air Bawah Tanah	-	68.788.000	-	-	-	-	60.437.500	-	-	-	-	87,86%	-	-	-		

Pangkalpinang, Januari 2014
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

Berdasarkan tabel 2.2 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran pada program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dari tahun 2007 - 2011 dapat dikatakan baik yaitu 100% meskipun pada kegiatan konversi minyak tanah ke LPG realisasi anggaran hanya 21.40%. Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh :
 1. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik.
 2. Adanya pendekatan persuasif yang bersifat pembinaan dan pengawasan antara pelaku/perusahaan pertambangan dalam menerapkan *good mining practice*.
 3. Berjalannya pengawasan dan peninjauan secara langsung ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan sehingga terjalin koordinasi yang baik.
 4. Lokasi kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dapat termonitoring dengan baik.

Pada kegiatan konversi minyak tanah ke LPG realisasi anggaran belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pada tahun 2011 konversi minyak tanah ke LPG secara nasional ditunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan pada tahun 2012.
2. Belum adanya kesiapan pengecer di SPBBG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya pemecahan masalah diatas antara lain:

1. Melanjutkan kegiatan konversi minyak tanah ke LPG secara nasional pada tahun 2012.
2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan SPPBG.

- b. Rasio antara realisasi dan anggaran pada program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

dari tahun 2007 - 2011 dapat dikatakan baik meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai seperti pembangunan gardu listrik untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Pemanfaatan Energi Nuklir dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR.

Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembuatan *master plan* kelistrikan.
2. Tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai dalam pembangunan PLT Hybrid.
3. Akses ke lokasi pembangunan dan pemasangan PLTS yang memadai serta koordinasi dengan masyarakat yang baik.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak kurang baiknya rasio realisasi anggaran pembangunan gardu listrik untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sosialisasi Pemanfaatan Energi Nuklir dan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gardu Distribusi, JTM dan JTR, antara lain :

1. Telah dilakukan proses pelelangan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sehingga kegiatan ini tidak bisa terlaksana, sedangkan untuk melaksanakan proses lelang yang ketiga tidak dimungkinkan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan.
2. Adanya tumpang tindih penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir antara pemerintah pusat (BATAN, Bapeten dan Kemenristek) dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya pemecahan masalah diatas antara lain:

1. Membuat surat Gubernur yang ditujukan ke PT. PLN Persero Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilaksanakan pekerjaan pembangunan distribusi

gardu listrik karena masih dalam kewenangan PT. PLN Persero.

2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat (BATAN, Bapeten dan Kemenristek) agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir.

c. Rasio antara realisasi dan anggaran pada program Penyediaan dan Pengembangan Air Baku, program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan program Penataan Peraturan Perundang-undangan dari tahun 2007 - 2008 dapat dikatakan baik. Keberhasilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam pelaksanaan Program/Kegiatan.
2. Akses ke lokasi pembangunan fasilitas air tanah yang memadai
3. Koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang baik
4. Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pusat yang baik.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, antara lain :

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetensi di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral;
Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral;
 - b. Meningkatkan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat terutama di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral.
2. Terlaksananya *Good Mining Practice* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan;
 - b. Meningkatkan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan;
 - c. Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - d. Melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah (PERDA) Pertambangan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. Melakukan koordinasi dan pemahaman tentang batasan-batasan WUP, WPN dan WPR;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata dalam penyusunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Penyediaan dan Pengembangan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah:
- a. Pengembangan energi alternative di Pulau-pulau terpencil;
 - b. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil;
 - c. Penyediaan Informasi dan data potensi Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - d. Mendorong masyarakat untuk melakukan konversi minyak tanah ke LPG
4. Penyediaan pelayanan informasi geologi dan sumber daya mineral;
- Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah:
- a. Melakukan penelitian mengenai cadangan air tanah dan daerah tangkapan air (*catchment area*);
 - b. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan, inventarisasi dan pemuktahiran data potensi sumber daya mineral dan geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral.
 - d. Peningkatan Pengelolaan sumber daya mineral.

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Pertambangan dan Energi tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama, dan seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Bertambahnya prognosa Lifting Migas dari ± 600.000 barrel pada tahun 2010 menjadi ± 700.000 barrel pada tahun 2011.
2. Memfasilitasi pembentukan ITA (International Tin Association) pada tanggal 02 Nopember 2011 yang menjadi cikal bakal pembentukan INATIN.
3. Mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.
4. Mendorong PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk membangun TIN Chemical di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang Pertambangan dan Energi berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 - 2012 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi.

Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2007 - 2012, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012 - 2017 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala antara lain:

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Internal

No.	Permasalahan	Faktor - faktor yang mempengaruhi
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi
		Kurangnya fasilitas operasional yang mendukung
		Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
2.	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran di	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang keuangan dan kearsipan

lingkungan Pertambangan Energi Kepulauan Belitung	Dinas dan Provinsi Bangka	Terbatasnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran
---	------------------------------------	--

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Eksternal

No.	Permasalahan	Faktor - faktor yang mempengaruhi
1	Kegiatan <i>Good Mining Practice</i> belum berjalan dengan baik	<p>Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan</p> <p>Kurangnya sosialisasi mengenai pertambangan yang berwawasan lingkungan</p> <p>Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah</p> <p>Kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan</p> <p>Kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Terbatasnya berbagai data teknis seperti peta zonasi pemanfaatan air tanah, <i>database</i> industri/rumah tangga pengguna air tanah.</p> <p>Kurangnya pemahaman penggunaan peralatan (<i>geolistrik</i>) untuk mengetahui letak titik pengeboran</p> <p>Kondisi ekstrim geologi lokal di daerah sulit air yang menyulitkan dalam proses pemboran air tanah</p>

		<p>Kurangnya penelitian mengenai cadangan air tanah dan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>)</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan peraturan atau pemberian izin pemanfaatan air tanah antara Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Belum optimalnya informasi mengenai potensi geologi di daerah</p>
2	Wilayah pertambangan (WUP, WPN, WPR) belum dimasukkan secara Nasional sebagai Wilayah Pertambangan (WP).	Kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang batasan-batasan WUP, WPN dan WPR dari Kabupaten/Kota.
3	Tata ruang wilayah belum ditetapkan sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.	Kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat guna menetapkan tata ruang wilayah khususnya sektor pertambangan
4	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata.	Belum adanya daerah zonasi laut untuk kawasan wisata sehingga menghambat penyusunan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5	Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.	Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar instansi lintas Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan instansi vertikal.

6	Informasi dan data potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih kurang	Kurangnya penelitian, pengembangan dan inventarisasi mengenai potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
7	Masih kurangnya supply listrik di daerah-daerah terpencil	Kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian berada di Pulau-pulau terpencil sehingga sulit untuk dijangkau

3.2 Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.2.1. Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur (2012 - 2017) adalah:

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Setidaknya ada 6 (enam) makna terhadap pernyataan Visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Mandiri*** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di Negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

4. **Berkeadilan** adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
5. **Sinergitas dan konektivitas** dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. **Daya saing** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

3.2.2. Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai Visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017, yaitu:

1. **Mengembangkan ekonomi kerakyatan** melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah Perdesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.

2. **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan Desa dan Kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. **Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh** untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. **Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government*** melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

3.3. Tujuan dan Sasaran Misi

3.3.1. Misi I :

“Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah Perdesaan/ Kecamatan/Kabupaten/Kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral”

Tujuan:

- a. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan

daya saing, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), potensi lokal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya daerah.

- b. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung.

Sasaran:

- a. Menkuatnya kapasitas koperasi dan UK.M berbasis komoditi daerah.
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
- c. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.
- d. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah
- e. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan.

3.3.2. Misi II :

“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”

Tujuan:

- a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan.
- b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

- e. Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

3.3.3. Misi III :

“Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi”

Tujuan:

- a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan.
- b. Memperkuat kemitraan dan partisipasi aktif antar *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana.
- b. berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- d. Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama.

3.3.4. Misi IV :

“Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global”

Tujuan:

- a. Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
- b. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.
- b. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
- c. Semakin terbukanya akses lintas Desa/Kecamatan, lintas Kabupaten/Kota, lintas Regional/Nasional dan lintas Negara.

3.3.5. Misi V :

“Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung”

Tujuan:

- a. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.

Sasaran:

- a. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

- b. Terwujudnya proses pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Misi yang berkaitan secara langsung dengan fungsi SKPD. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Misi Kesatu, Ketiga dan Keempat yaitu:

1. Misi kesatu :

Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah Perdesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral, kaitan tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memfokuskan arah kebijakan yang akan diprioritaskan dengan program CD/CSR oleh pelaku tambang, meningkatkan keterampilan dan kompetensi terhadap aparatur dan pelaku tambang, penggunaan energi baru terbarukan dan konversi minyak tanah ke LPG sehingga dapat menciptakan sentra-sentra perekonomian.

2. Misi Ketiga :

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi. Terkait hal tersebut Dinas Pertambangan dan Energi melalui arah kebijakan yang akan diprioritaskan lebih difokuskan pada pelaksanaan *good minning practice* dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan dan pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang oleh pelaku tambang.

3. Misi keempat :

Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global, Dinas Pertambangan dan Energi melalui arah kebijakan yang diprioritaskan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dibidang energi sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi.

3.4 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten dibidang Pertambangan dan Energi.
2. Terbatasnya Anggaran/Dana sehingga program/kegiatan belum dapat berjalan secara optimal.
3. Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemerintah pusat belum optimal.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Wilayah pertambangan (WUP, WPN, WPR) belum dimasukkan secara Nasional sebagai Wilayah Pertambangan (WP).
2. Tata ruang wilayah belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.
3. Adanya benturan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP).
4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata.
5. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan

pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.

6. Masih banyaknya kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditinjau dari Rencana Strategis (Renstra) K/L, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RTRW dan KLHS antara lain:

1. Belum mencukupinya ketersediaan listrik sehingga diperlukan penambahan pembangunan pembangkit listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibidang Pertambangan dan Energi dan kurangnya fasilitas operasional yang mendukung, yang berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. RTRW Provinsi belum ditetapkan sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.
4. Adanya benturan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
5. Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan.
7. Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
8. Rasio Elektrifikasi masih rendah sebesar 73.94% dan jaringan listrik serta pembangkit listrik yang terbatas.
9. Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan Pulau-pulau kecil.

10. Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
11. Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
12. Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dilakukan penambahan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah dan menambah jumlah fasilitas operasional yang dapat mendukung berjalannya program/kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan koordinasi dan pemahaman mengenai batasan-batasan WUP, WPN dan WPR dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat menetapkan tata ruang wilayah khususnya sektor pertambangan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
5. Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut guna menuju *good minning practice*.
7. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kabupaten/Kota.

8. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Melakukan penelitian, pengembangan dan data inventaris energi baru dan terbarukan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
11. Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2012-2017

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.1.1. Visi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 adalah ***“Terwujudnya Pasokan Energi dan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral yang Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”***.

Setidaknya ada 3 (tiga) makna terhadap pernyataan Visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Pasokan Energi*** menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertambangan dan Energi memprioritaskan program diversifikasi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) energi alternative lainnya menuju pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) yang didukung dengan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, transmisi, jaringan distribusi listrik dan gardu distribusi.
2. ***Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral yang Berwawasan Lingkungan*** dimaknai dengan peningkatan aktifitas investasi di sektor Pertambangan Mineral yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan konsep penambangan yang efisien dan produktif dengan penguasaan teknologi, sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan serta berlandaskan pada regulasi dan kebijakan sehingga tercipta *good minning practice*.
3. ***Kesejahteraan*** dimaknai dengan pembangunan infrastruktur dibidang pertambangan dan energi lebih mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah

strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.

4.1.2. Misi Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam upaya untuk mencapai Visi di atas, maka ada 5 (lima) misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 - 2017, yaitu:

1. *Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi;*

Melalui penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi energi baru terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. *Meningkatkan Kemampuan Dalam Pengelolaan Energi, Mineral dan Kegeologian;*

Melalui pengembangan pembangunan infrastruktur energi, mineral dan kegeologian di Wilayah-wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi;

3. *Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan;*

Melalui pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku tambang dan menerbitkan regulasi dan kebijakan di bidang pertambangan yang dapat memperkecil dampak terhadap lingkungan;

4. *Meningkatkan Pengelolaan Industri Hilir Pertambangan yang Kondusif dan Berwawasan Lingkungan;*

Melalui peningkatan aktifitas investasi di sektor Pertambangan Mineral dengan memberikan kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam pengelolaan pertambangan sesuai dengan Undang-undang Pertambangan dan Mineral karena hal tersebut akan mendukung iklim investasi pertambangan yang kondusif;

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Kompeten di Bidang Pertambangan dan Energi;

Dengan mengikutsertakan aparatur di dalam pendidikan dan pelatihan formal di bidang Pertambangan dan Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pemanfaatan pengembangan berbagai sumber energi;	Tercapainya penggunaan Mikrohidro, (PLTMH), PLTS dan tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	Jumlah PLTMH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 unit	-	-	-	-
			Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
			Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan EBT	200 unit	200 unit	200 unit	200 unit	200 unit
			Jumlah spare parts pembangkit listrik energi terbarukan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Jumlah KK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi Minyak Tanah ke LPG	1 paket	-	-	-	-
2	Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral;	Tercapainya Desa Mandiri Energi (DME) dan penyediaan air bersih	Jumlah kebijakan pengelolaan air tanah	1 PERDA	1 PERGUB	-	-	-
			Jumlah kapasitas PLTU (MW)	30.5 MW	30 MW	30 MW	14 MW	26 MW
			Jumlah kapasitas JTM (kms)	214.2 kms	221.3 kms	231.1 kms	164.9 kms	170.1 kms
			Jumlah kapasitas JTR (kms)	239.9 kms	247.8 kms	258.8 kms	184.7 kms	190.5 kms
			Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis listrik	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
			Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) Ketenagalistrikan	1 PERDA	1 PERGUB	-	-	-
			Tersedianya Peta Hidrogeologi 1 : 100.000 dan peta zonasi air	1 paket (7 CAT)	-	-	-	-

3	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju Good Mining Practice;	Tercapainya <i>Good Mining Practice</i> di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i> (CD / CSR)	15 laporan				
			Jumlah regulasi dan kebijakan di bidang Pertambangan yang dapat memperkecil dampak terhadap lingkungan	1 PERGUB	-	-	-	-
			Jumlah pengawasan di bidang Reklamasi dan Pasca Tambang	15 laporan				
			Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan	13	13	13	13	13
			Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan penambangan	20 perusahaan				
			Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	50 laporan				
			Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	40 laporan				
			Jumlah Diklat untuk Pelaku Tambang	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan
4	Mewujudkan peningkatan peran sektor Pertambangan bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Pertambangan dan Energi serta fasilitas pembangunan infrastruktur	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
			Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan dan Mineral	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000

5	Mewujudkan peran SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi.	Tercapainya tata kelola perkantoran yang baik terutama di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis di bidang Pertambangan, energi, mineral dan geologi	10 orang	10 orang	8 orang	8 orang	8 orang
			Jumlah kegiatan sinkronisasi dan implementasi bidang pertambangan dan energi	2 kegiatan				

Pangkalpinang, Januari 2014
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing Misi.

4.2.1. MISI I :

Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;

a. Tujuan:

Mewujudkan pemanfaatan pengembangan berbagai sumber energi;

b. Sasaran:

Tercapainya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG;

4.2.2. MISI II :

Meningkatkan Kemampuan Dalam Pengelolaan Energi, Mineral dan Gegeologian;

a. Tujuan:

Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral;

b. Sasaran:

Tercapainya Desa Mandiri Energi (DME);

4.2.3. MISI III :

Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan;

a. Tujuan:

Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju *Good Mining Practice*;

b. Sasaran:

Tercapainya *Good Mining Practice* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4.2.4. MISI IV :

Meningkatkan Pengelolaan Industri Hilir Pertambangan yang Kondusif dan Berwawasan Lingkungan;

a. Tujuan:

Mewujudkan peningkatan peran sektor Pertambangan bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;

b. Sasaran:

Meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Pertambangan dan Energi serta fasilitas pembangunan infrastruktur;

4.2.5. MISI V :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Kompeten di Bidang Pertambangan dan Energi;

a. Tujuan :

Mewujudkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi.

b. Sasaran :

Tercapainya tata kelola perkantoran yang baik terutama di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi.

TABEL 4.2
REVIEW PECAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2017

No.	Indikator	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Jumlah PLTMH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 unit		1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Jumlah Penerangan Jalan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)	200 unit		200 unit	200 unit	200 unit	200 unit	200 unit	-	100 unit	-	-	-	-	50%	-	-	-
4	Jumlah spare parts pembangkit listrik energi terbarukan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
5	Jumlah KK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi Minyak Tanah ke LPG	1 paket		1 paket	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	100%	-	-	-
6	Jumlah kebijakan pengelolaan air tanah	1 Perda		1 Perda	1 Pergub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah kapasitas PLTU (MW)	30.5 MW		30.5 MW	30 MW	30 MW	14 MW	26 MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah kapasitas JTM (kms)	214.2 kms		214.2 kms	221.3 kms	231.1 kms	164.9 kms	170.1 kms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah kapasitas JTR (kms)	239.9 kms		239.9 kms	247.8 kms	258.8 kms	184.7 kms	190.5 kms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) Ketenagalistrikan	1 Perda		1 Perda	1 Pergub	-	-	-	-	1 Perda	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tersedianya Peta Hidrogeologi 1 : 100.000 dan peta zonasi air	1 paket (7 CAT)		1 paket (7 CAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development (CD / CSR)	15 laporan		15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	-	-	-	100%	100%	-	-	-

13	Jumlah pengawasan dibidang Reklamasi dan Pasca Tambang	15 laporan		15 laporan	-	-	-	100%	100%	-	-	-						
14	Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan penambangan	20 perusahaan		20 perusahaan	-	-	-	100%	100%	-	-	-						
15	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	50 laporan		50 laporan	-	-	-	100%	100%	-	-	-						
16	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	40 laporan		40 laporan	-	-	-	100%	100%	-	-	-						
17	Jumlah Diklat untuk Pelaku Tambang	4 kegiatan		4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	100%	100%	-	-	-
18	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	6.000.000.000		6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	8.877.293.836	7.201.762.043	-	-	-	100%	100%	-	-	-
19	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan dan Mineral	65.000.000.000		65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	86.324.969.282	64.097.025.011	-	-	-	100%	98,61%	-	-	-
20	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis di bidang Pertambangan, energi, mineral dan geologi	10 orang		10 orang	10 orang	8 orang	8 orang	8 orang	10 orang	10 orang	-	-	-	100%	100%	-	-	-
21	Jumlah kegiatan sinkronisasi, implementasi bidang pertambangan dan energi	2 kegiatan		2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	100%	50%	-	-	-					

Pangkalpinang, Januari 2014
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017:

Kebijakan dan strategi adalah pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi isu utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1. Strategi

Strategi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut:

4.3.1.1. Strategi 1 :

Memanfaatkan energi baru terbarukan dan konservasi Energi;

A. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang pertama ini adalah:

1. Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah.
2. Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti PLTMH dan Biomassa terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem kelistrikan.
3. Mendorong pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan konservasi energi dengan :
 - a. Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor pemerintah.
 - b. Mendorong penggunaan peralatan pemanfaat energi yang efisien melalui standar dan label.
 - c. Mendorong industri dan bangunan komersial untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi.
5. Mendorong masyarakat untuk melakukan konversi minyak tanah ke LPG.

B. Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) : Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

2. Kelemahan (*weakness*) : Keterbatasan potensi sumber daya alam untuk pemanfaatan energi baru terbarukan.
3. Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk mengembangkan teknologi di bidang energi.
4. Ancaman (*Threats*) : Belum dimanfaatkannya potensi baru terbarukan secara optimal.

4.3.1.2. Strategi 2 :

Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian;

A. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang kedua ini adalah:

1. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) untuk meningkatkan penyediaan energi di perdesaan dalam pemenuhan kebutuhan energi.
2. Meningkatkan kemampuan penyaluran tenaga listrik dengan mendorong pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, transmisi, jaringan distribusi listrik dan gardu distribusi.
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang energi, mineral dan kegeologian.
4. Mendorong penelitian dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
5. Meningkatkan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penata ruang, reklamasi kawasan bekas tambangan dan mitigasi bencana alam.
6. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan data cadangan serta melakukan inventarisasi dan pemuktahiran data

B. Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) : Adanya Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
2. Kelemahan (*weakness*) : Terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.

3. Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
4. Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.

4.3.1.3. Strategi 3 :

Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan;

- A. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian Misi yang ketiga ini adalah:
1. Meningkatkan penambangan yang efisien dan produktif dengan penguasaan teknologi, sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan.
 2. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui wadah koperasi, dalam pengusahaan pertambangan terutama pertambangan rakyat.
 3. Penyediaan informasi reklamasi kawasan bekas tambang.
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pelaku tambang dalam melakukan penambangan melalui sosialisasi dan diklat di bidang pertambangan.
 5. Menerbitkan regulasi dan kebijakan di bidang pertambangan yang dapat memperkecil dampak terhadap lingkungan.
 6. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan pertambangan, keselamatan kerja dan usaha penunjang bidang pengawasan.
 7. Menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan.
 8. Meningkatkan kegiatan masyarakat atau *Community Development (comdev)* yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

B. Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) : Adanya Peningkatan Pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
2. Kelemahan (*weakness*) : Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran keuangan dalam melakukan pengawasan di bidang pertambangan.
3. Peluang (*Opportunity*) : Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, lembaga dan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pengawasan di bidang pertambangan.
4. Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pertambangan.

4.3.1.4. Strategi 4 :

Meningkatkan pengelolaan industri hilir pertambangan yang kondusif dan berwawasan lingkungan;

A. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang keempat ini adalah:

1. Mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor Pertambangan Mineral.
2. Memberi kepastian hukum yang adil kepada bada usaha dalam pengelolaan pertambangan timah sesuai dengan Undang-undang Pertambangan dan Mineral karena hal tersebut akan mendukung iklim investasi pertambangan.
3. Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Pertambangan dan Mineral
4. Meningkatkan upaya promosi investasi untuk menyakinkan para investor di Dalam Negeri dan Luar Negeri tentang prospek dan keamanan investasi pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

6. Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan yaitu reklamasi terhadap lahan bekas tambang.

B. Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) : Adanya peningkatan pengelolaan industri hilir pertambangan.
2. Kelemahan (*weakness*) : Masih terbatasnya energi sehingga pengembangan pengelolaan industri hilir pertambangan masih belum optimal.
3. Peluang (*Opportunity*) : Melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mengembangkan industri hilir.
4. Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan industri hilir di bidang pertambangan.

4.3.1.5. Strategi 5 :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di bidang Pertambangan dan Energi.

A. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang ke 5 (lima) ini adalah:

1. Pemetaan kebutuhan (*demand*) sumber daya manusia di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi.
2. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berbasis kompetensi serta diklat khusus oleh Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi sesuai kebutuhan.
3. Modernisasi sarana dan prasarana di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi.
4. Meningkatkan kemampuan aparatur yang telah mengikuti diklat melalui program diklat *upgrading* sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki.

B. Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*) : Adanya peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompeten.
2. Kelemahan (*weakness*) : Keterbatasan SDM yang berkualitas dan yang berkompeten.
3. Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis di bidang pertambangan dan energi.
4. Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM di bidang pertambangan dan energi.

4.3.2. Kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kebijakan untuk mencapai strategi di atas ditempuh melalui berbagai program/kegiatan dan fokus prioritas sebagai berikut:

A. Bidang Pertambangan Umum

Fokus prioritas pada bidang Pertambangan Umum, antara lain:

1. Peningkatan nilai tambah produk tambang mineral
2. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dengan melakukan *best mining practice*.
3. Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
4. Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan yaitu reklamasi terhadap lahan bekas tambang.
5. Peningkatan investasi di bidang Pertambangan.
6. Babel Tin Market
7. Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Pertambangan Mineral
8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku pertambangan.

B. Bidang Energi

Fokus prioritas pada bidang Energi, antara lain :

1. Peningkatan jumlah pembangkit listrik, transmisi dan gardu ketenagalistrikan

2. Melanjutkan program penelitian dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
3. Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan.
4. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG
5. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil.
6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan.
7. Pengaturan penerbitan perizinan/rekomendasi di bidang energi.

C. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Fokus prioritas pada bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral
2. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi.
3. Penyediaan pelayanan informasi geologi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penata ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.
4. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan, inventarisasi dan pemuktahiran data potensi sumber daya mineral dan geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Bidang Bina Usaha

Fokus prioritas pada bidang Bina Usaha, antara lain :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pertambangan.
2. Pengaturan penerbitan perizinan/rekomendasi izin usaha pertambangan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Penyelesaian masalah konflik pertambangan dan energi di Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 - 2017, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012 - 2017, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam urusan rutin dan urusan pilihan program untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan di bidang pertambangan dan energi, antara lain sebagai berikut:

5.1.1. Program Kegiatan Rutin

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan sumber daya aparatur.

5.1.2. Program Kegiatan Urusan Pilihan

1. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
2. Program pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi.
3. Program pembinaan dan pengusahaan mineral, panas bumi dan air tanah.
4. Program penelitian/pengembangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan air tanah
5. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Ke-										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							1		2		3		4		5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp. (dalam juta rupiah)	Target	Rp. (dalam juta rupiah)	Target	Rp. (dalam juta rupiah)	Target	Rp. (dalam juta rupiah)	Target	Rp. (dalam juta rupiah)			Target	Rp. (dalam juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
TUJUAN KE-1	SASARAN KE-1																			
Mewujudkan pemanfaatan pengembangan berbagai sumber energi;	Tercapainya penggunaan Mikrohidro, (PLTMH), PLTS dan tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG		02.03.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN																
				<i>Kegiatan :</i>																
		Jumlah DED PLTMH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dst.....	Penyusunan DED Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <i>Output :</i> Tersusunnya DED Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<i>Outcome :</i> Tersediannya DED PLTMH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1 Laporan	210	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

		Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dst.....	Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat/ Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Tersedianya listrik dengan menggunakan PLTS terpusat <u>Output :</u> Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	2 unit	2.000	10 unit	10.000	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
		Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan EBT	dst.....	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Tersedianya penerangan jalan umum dengan menggunakan EBT <u>Output :</u> Terbangunnya Penerangan Lampu Jalan (PJU) dengan menggunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	200 unit	5.000	1000 unit	25.000	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
		Jumlah spare parts pembangkit listrik energi terbarukan	dst.....	Pengadaan sparepart pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah terpasang di provinsi kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Terjaganya pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah terpasang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	200	1 paket	250	1 paket	300	1 paket	350	1 paket	400	5 paket	1.500	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

					Output : Tersedianya pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah terpasang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung															
			02.03.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI																
		Jumlah KK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi Minyak Tanah ke LPG	dst.....	Konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Outcome : Jumlah KK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi Minyak Tanah ke LPG Output : Berjalannya konversi Minyak Tanah ke LPG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1 paket	100	1 paket	200	-	-	-	-	-	-	2 paket	300	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN KE-2	SASARAN KE-2																			
Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral;	Tercapainya Desa Mandiri Energi (DME)		02.03.22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH																
				<u>Kegiatan :</u>																
		Jumlah kebijakan pengelolaan air tanah	dst.....	Kebijakan Pengelolaan Air Tanah	<u>Outcome :</u> Tercapainya pengelolaan air tanah yang baik <u>Output :</u> Tersedianya kebijakan pengelolaan air tanah	-	1 PERGUB	150	-	-	-	-	-	-	-	-	1 PERGUB	150	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Jumlah kapasitas PLTU (MW)	dst.....	Pembangunan PLTU (MW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Tersedianya listrik dengan menggunakan PLTU <u>Output :</u> Terbangunnya PLTU (MW) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	76.5 MW	PT. PLN Persero	30.5 MW	PT. PLN Persero	30 MW	PT. PLN Persero	30 MW	PT. PLN Persero	14 MW	PT. PLN Persero	181 MW	PT. PLN Persero	PT. PLN Persero	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Jumlah kapasitas JTM (kms)	dst.....	Pemasangan JTM (kms) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Tersedianya listrik melalui JTM <u>Output :</u> Terpasangnya JTM (kms) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	270.4 kms	PT. PLN Persero	214.2 kms	PT. PLN Persero	221.3 kms	PT. PLN Persero	231.1 kms	PT. PLN Persero	164.9 kms	PT. PLN Persero	1101.9 kms	PT. PLN Persero	PT. PLN Persero	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

		Jumlah Kapasitas JTR (kms)	dst.....	Pemasangan JTR (kms) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<u>Outcome :</u> Tersedianya listrik melalui JTR <u>Output :</u> Terpasangnya JTR (kms) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	302.9 kms	PT. PLN Persero	239.9 kms	PT. PLN Persero	247.8 kms	PT. PLN Persero	258.8 kms	PT. PLN Persero	184.7 kms	PT. PLN Persero	1234.1 kmS	PT. PLN Persero	PT. PLN Persero	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Jumlah PERDA Ketenagalistrikan	dst.....	PERDA Ketenagalistrikan	<u>Outcome :</u> Berjalannya sistem kelistrikan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <u>Output :</u> Tersusunnya PERDA Ketenagalistrikan	-	1 PERDA	150	1 PERGUB	150	-	-	-	-	-	-	1 PERDA, 1 PERGUB	300	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			02.03.22	PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM & AIR TANAH																
		Jumlah Peta Hidrogeologi 1 : 100.000 dan peta zonasi air	dst.....	Pembuatan Peta Hidrogeologi 1 : 100.000 dan Peta Zonasi Air Tanah	<u>Outcome :</u> Diketahuinya hidrogeologi dan zonasi air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <u>Output :</u> Tersedianya Peta Hidrogeologi 1 : 100.000 dan Peta Zonasi Air Tanah	-	-	-	1 paket (7 CAT)	1.050	-	-	-	-	-	-	1 paket (7 CAT)	1.050	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN KE-3	SASARAN KE-3																				
Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju Good Mining Practice;	Tercapainya Good Mining Practice di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		02.03.22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH																	
				<u>Kegiatan :</u>																	
		Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development (CD / CSR)	dst.....	Evaluasi pelaksanaan <i>Community Development</i> (CD / CSR)	<u>Outcome :</u> Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal penambangan <u>Output :</u> Berjalannya pelaksanaan program <i>Community Development</i> (CD / CSR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	15 laporan	50	15 laporan	75	15 laporan	85	15 laporan	100	15 laporan	125	75 laporan	435	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan penambangan	dst.....	Perusahaan yang diawasi kegiatan penambangan	<u>Outcome :</u> Tercapainya good mining practice di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <u>Output :</u> Terbinanya pelaku tambang/perusahaan yang melakukan penambangan	-	13 laporan	50	13 laporan	50	13 laporan	50	13 laporan	50	13 laporan	50	65 laporan	250	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			

		Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	dst.....	Penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	<u>Outcome :</u> Terkoordinasinya kegiatan penambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <u>Output :</u> Tersedianya laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	-	40 laporan	50	200 laporan	250	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	dst.....	Monitoring dan Evaluasi	<u>Outcome :</u> Terlaksananya program dan kegiatan yang berkualitas <u>Output :</u> Penilaian dan peningkatan kualitas serta kebijakan program	-	50 laporan	150	50 laporan	170	50 laporan	150	50 laporan	150	50 laporan	150	250 laporan	770	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Jumlah Diklat untuk Pelaku Tambang	dst.....	Jumlah pelatihan teknis yang dilaksanakan (POP dan POM)	<u>Outcome :</u> Berjalannya good mining practice di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <u>Output :</u> Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil terutama di bidang Pertambangan dan Mineral	-	4 kegiatan	150	3 kegiatan	150	19 kegiatan	2.850	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						

			02.03.16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN																
		Jumlah pengawasan dibidang Reklamasi dan Pasca Tambang	dst.....	Pengawasan dibidang Reklamasi dan Pasca Tambang	<u>Outcome :</u> Tersedianya lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya <u>Output :</u> Berjalannya pelaksanaan program Reklamasi dan Pasca Tambang	-	15 laporan	50	15 laporan	75	15 laporan	85	15 laporan	100	15 laporan	125	75 laporan	435	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TUJUAN KE-4	SASARAN KE-4																			
Mewujudkan peningkatan peran sektor Pertambangan bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Pertambangan dan Energi serta fasilitas pembangunan infrastruktur		02.03.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI																
				<u>Kegiatan :</u>																
		Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	dst.....	Adanya Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Minyak Bumi	<u>Outcome :</u> Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Minyak Bumi	-	6.000	150	6.000	150	6.000	150	6.000	150	6.000	150	30.000	750	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

					<u>Output :</u> Berperan serta dalam pembahasan lifting, DBH dan Migas Bangka Belitung serta berpartisipasi dalam kegiatan FKDPM																
			02.03.22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH	-																
		Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan dan Mineral	dst.....	Dana Bagi Hasil (DBH) di bidang Pertambangan (Royalti / land rent)	<u>Outcome :</u> Penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari Sektor Pertambangan (Royalti / land rent) <u>Output :</u> Tersalurnya DBH SDA Pertambangan Umum yang Tertib Administrasi	-	65.000	150	65.000	150	65.000	150	65.000	150	65.000	150	325.000	750	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
TUJUAN KE-5	SASARAN KE-5																				
Mewujudkan peran SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi.	Tercapainya tata kelola perkantoran yang baik terutama di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi		03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-																
				<u>Kegiatan :</u>																	
		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis di bidang	dst.....	Pelatihan Teknis Aparatur	<u>Outcome :</u> Tata kelola perkantoran yang baik terutama di bidang	-	16 orang	65	10 orang	50	10 orang	50	8 orang	45	8 orang	45	52 orang	255	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

		Pertambangan, energi, mineral dan geologi			Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi <u>Output :</u> Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil terutama di bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi														an Bangka Belitung	
		Jumlah kegiatan sinkronisasi dan implementasi bidang pertambangan dan energi	dst.....	Sinkronisasi Implementasi Program Pertambangan dan Energi	<u>Outcome :</u> Terbinanya hubungan yang harmonis dan sinergis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dengan Kabupaten <u>Output :</u> Berjalannya program/kegiatan yang baik dan lancar dibidang Pertambangan dan Energi	-	2 kegiatan	100	2 kegiatan	133	2 kegiatan	150	2 kegiatan	150	2 kegiatan	150	10 kegiatan	533	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Januari 2014
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 - 2017 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, pada tabel 6.1.

15	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektur tambang	-	40 laporan	100%				
16	Jumlah Diklat untuk Pelaku Tambang	-	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	100%
17	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100%
18	Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan dan Mineral	-	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	100%
19	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis di bidang Pertambangan, energi, mineral dan geologi	-	10 orang	10 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%
20	Jumlah kegiatan sinkronisasi, implementasi bidang pertambangan dan energy	-	2 kegiatan	100%				

Pangkalpinang, Januari 2014
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

FERY AFRIYANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19700409 199603 1 004

BAB VII

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Dalam mendukung pembangunan daerah, Dinas Pertambangan dan Energi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 - 2017 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 5 (lima) tahun ke depan, program-program di bidang Pertambangan dan Energi tersebut disusun berdasarkan permasalahan mengenai Pertambangan dan Energi yang ditemukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta penanggulangannya yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit pada perencanaan bidang Pertambangan dan Energi.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi 2012 - 2017 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.